CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 - 2023
s.d TRIWULAN IV TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN S.D 2020 (%)	STATUS			RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	BIDANG PERHUBUNGAN																					
		INDIKATOR KINERJA SASARAN																				
1		Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	1,22	1,54	1,56	1,59	1,61	0,30	5,79				100	TT			Jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya (n-1) dikurangi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun (n) dibagi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya (n-1)	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dalam upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas	Sinergitas para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat	Belum sinerginya para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat	Meningkatkan sinergitas para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui wadah forum LLAJ
			Jumlah kasus Kecelakaan Lalu Lintas						328	309												
			Jumlah kasus Kecelakaan Lalu Lintas tahun sebelumnya						329	328												
		INDIKATOR PROGRAM																				
1	Program Pengelolaan Lalu Lintas dan Perparkiran	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	%	33,82	34,78	36,23	37,68	38,65	33,82	34,78				89,99		AT		Jumlah ruas jalan kabupaten yang didukung perlengkapan jalan yang memadai dibagi Jumlah Ruas Jalan di Kabupaten Temanggung dikali 100%	Perlengkapan Jalan bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar	Kewajiban untuk menyediakan perlengkapan jalan yang memadai guna meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mendorong terwujudnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	Lokasi parkir tepi jalan umum kondisinya berubah setiap saat sehingga metode pengelolaannya juga berubah menyesuaikan kondisi lapangan, sedangkan dana operasional perparkiran kurang	Anggaran Penyediaan perlengkapan jalan dapat diusulkan melalui sektor anggaran diluar APBD (DAK / Bankeu) sehingga kebutuhan penyediaan perlengkapan Jalan dapat tetap dipenuhi. Selain itu kita perlu memprioritaskan
			Jumlah ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan						*70*	*72*												
			Jumlah Ruas Jalan Kabupaten di Temanggung						*207*	*207*												
		Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	95,45	96,36	97,27	98,18	100	95,45	97,27				97,27		AT		Jumlah titik parkir tertangani dibagi jumlah titik parkir dikali 100%	Pengelolaan titik parkir yang baik bertujuan untuk meminimalisir adanya parkir liar dan menyelenggarakan perparkiran yang efektif dan efisien	Pengelolaan titik parkir yang baik bertujuan untuk meminimalisir adanya parkir liar dan menyelenggarakan perparkiran yang efektif dan efisien	Manajemen Pengelolaan perparkiran belum efektif karena dalam rangka mencapai target Pendapatan Asli Daerah melalui sektor perparkiran	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya baik sumber daya Manusia maupun Sumberdaya Anggaran Pengelolaan Perparkiran, dalam rangka optimalisasi manajemen perparikran agar menjadi lebih baik
				105,00	*106,00*	*107,00*	*108,00*	*110,00*														
				110,00	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*														
			Jumlah titik parkir tertangani						*105,00*	*107,00*												
			Jumlah potensi titik parkir						*110,00*	*110,00*												
2	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	99,32	99,04	99,68	99,53	99,50	102,21	83,61				84,02		AT		Jumlah kendaraan bermotor laik jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor wajib uji dikali 100%	Kendaraan yang laik jalan adalah upaya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan yang diakibatkan faktor kendaraan	Setiap kendaraan wajib uji yang diperasikan dijalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana amanat Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan	Kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk mengujikan kendaraannya secara berkala masih rendah.	Perlu adanya kegiatan sosialisasi dan informasi terkait dengan pentingnya pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan bagi keselamatan LLAJ, serta peningkatan pemeriksaan kelaikan kendaraan wajib uji di jalan guna memastikan operasional kendaraan di jalan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan
				7731	*7718*	*7791*	*7794*	*7803*														
				7784	*7793*	*7816*	*7831*	*7842*														
			Jumlah Kendaraan Bermotor Laik Jalan						*7504*	*5487*												
			Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji						*7342*	*6563*												
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	%	25,00	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00				50,00		AT		Jumlah bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar dibagi jumlah bengkel umum kelas 1 dikali 100%	Bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar mendorong tercapainya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh	Bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar, mendorong tercapainya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh	Untuk menjadi bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai.	Perlu adannya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar
			Jumlah bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar						*1*	*1*												
			Jumlah Bengkel Umum Kelas 1						*4*	*4*												
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	%	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50	12,50	25,00				40,00		AT		Jumlah bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar dibagi jumlah bengkel umum kelas 2 dikali 100%	Bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar mendorong tercapainya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu	Bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar, mendorong tercapainya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu	Untuk menjadi bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang	Perlu adannya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar
				1	*2*	*3*	*4*	*5*														
				8	*8*	*8*	*8*	*8*														
			Jumlah bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar						*1*	*2*												

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN S.D 2020 (%)	STATUS			RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK					
			Jumlah bengkel umum kelas 2						*8*	*8*									lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan	lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan	memadai.	
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	%	43,48	47,83	56,52	60,87	65,22	43,48	47,83				73,33		AT		Jumlah bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar dibagi jumlah bengkel umum kelas 3 dikali 100%	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar mendorong tercapainya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan	Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar, mendorong tercapainya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan	Untuk menjadi bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai.	Perlu adanya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar
				20	*22*	*26*	*28*	*30*														
				46	*46*	*46*	*46*	*46*														
			Jumlah bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar						*20*	*22*												
			Jumlah bengkel umum kelas 3						*46*	*46*												
3	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	82,05	84,62	84,62	87,18	87,18	80,00	80,00				91,76		AT		Jumlah jaringan trayek yang terlayani angkutan umum dibagi jumlah jaringan trayek kabupaten dikali 100%	Angkutan umum yang menjangkau seluruh wilayah bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa angkutan bagi masyarakat	Kewajiban Pemerintah untuk menyediakan layanan angkutan umum yang menjangkau setiap wilayah sebagaimana amanat undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasi semakin turun yang kemudian beralih menggunakan kendaraan pribadi yang relatif lebih handal dan lebih fleksibel	Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang berdaya saing serta handal dalam penyediaan jasa layanan angkutan umum sebagaimana Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
				36,00	*37,00*	*37,00*	*38,00*	*38,00*														
				45,00	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*														
			Jumlah Jaringan trayek dilalui Angkutan Umum						*36,00*	*36,00*												
			Jumlah Jaringan trayek Kabupaten						*45,00*	*45,00*												
		Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	85,71	100				100		AT		Jumlah terminal tipe C aktif dibagi jumlah terminal tipe C dikali 100%	Terminal adalah simpul transportasi yang berfungsi untuk naik turun penumpang dan perpindahan moda angkutan umum	Adanya kewajiban angkutan umum untuk masuk dan menggunakan fasilitas terminal sebagaimana amanat Undang undang no. 22 tahun 2019	Tingkat operasional angkutan umum yang semakin rendah akibat minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum mempengaruhi	Menyiapkan Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya Anggaran yang memadai untuk pelaksanaan mengaktifkan terminal agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya
			Jumlah Terminal Tipe C Aktif						*6,00*	*7,00*												
			Jumlah Terminal Tipe C						*7,00*	*7,00*												
		Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	71,43	71,43	85,71	85,71	100	71,43	71,43				71,43		AT		Jumlah Terminal tipe C dalam kondisi baik dibagi jumlah terminal tipe C	Terminal sebagai fasilitas umum harus berfungsi dengan baik sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat	Terminal sebagai penunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda di daerah kabupaten, maka Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara terminal tipe C perlu menyelenggarakan Terminal tipe C yang baik	Pemeliharaan terminal agar senantiasa dalam kondisi baik membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar	Penyediaan anggaran pemeliharaan yang memadai serta peningkatan kinerja petugas yang bertanggung jawab memastikan terminal senantiasa dlam kondisi prima dan siap untuk aktifitas pelayanan,
				5,00	*5,00*	*6,00*	*6,00*	*7,00*														
				7,00	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*														
			Jumlah Terminal Tipe dalam Kondisi Baik						*5,00*	*5,00*												
			Jumlah Terminal Tipe C						*7,00*	*7,00*												
-																						
JML INDIKATOR SASARAN		1	RATA - RATA CAPAIAN SASARAN											100	1	0	0					
JML INDIKATOR PROGRAM		9	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM											77,54	0	9	0					
JML SEMUA INDIKATOR		**10**	***RATA - RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH***											***88,77***	***1***	***9***	***0***					

Keterangan :
TT (Telah tercapai) = 100%
AT (Telah Tercapai) = 40% - 99,9%
UK (Upaya Keras) = 0 - 39,99%

Temanggung, 5 Januari 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

SUPRIYANTO, AP.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19751128 199402 1 001